# I. P E N D A H U L U A N

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang Tahun 2019. CaLK dimaksudkan agar laporan keuangan dapat dipahami oleh pemakai informasi laporan keuangan secara luas tidak terbatas hanya untuk pembaca tertentu. Oleh sebab itu laporan keuangan mungkin mengandung informasi yang dapat mempunyai potensi kesalahpahaman diantara pembacanya. Untuk menghindari kesalahpahaman, laporan keuangan dilengkapi dengan catatan atas laporan keuangan yang berisi informasi untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Kesalahpahaman dapat saja disebabkan oleh persepsi dari pembaca laporan keuangan. Pembaca yang terbiasa dengan orientasi anggaran mempunyai potensi kesalahpahaman dalam memahami konsep akuntansi akrual. Pembaca yang terbiasa dengan laporan keuangan sektor komersial cenderung melihat laporan keuangan pemerintah seperti laporan dikeuangan perusahaan. Untuk itu catatan atas laporan keuangan manjadi sangat penting bagi pengguna laporan keuangan pemerintah. Selain itu, pengungkapan basis akuntansi dan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pengguna laporan keuangan untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan.

## MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Tujuan Umum

Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

1. Tujuan Khusus

Secara khusus tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya dengan:

1. Menyediakan informasi mengenai sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban dan ekuitas pemerintah daerah;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya;
5. Menyediakan informasi mengenai cara pemerintah daerah mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kas nya.
6. Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintahan; dan
7. Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mendanai aktivitasnya.

##

## LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Rebuplik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Rebublik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 07 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
34. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 72 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi;
35. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 73 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah; dan
36. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 74 Tahun 2014 tentang Bagan Akun Standar.
37. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
38. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Lumajang Nomor 70 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019
39. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 68 Tahun 2019 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

##

## SISTEMATIKA

CaLK berisi penjelasan atau daftar-daftar terinci atau analisis atas suatu pos yang disajikan di dalam laporan realisasi anggaran, neraca dan laporan arus kas. CaLK juga menyajikan informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Sistematika Catatan atas Laporan Keuangan sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan
 |
| BAB II | IKHTISAR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

2.1.1. Belanja Daerah2.1.2. Realisasi Pencapaian Target Kinerja Program2.1.3. Posisi Keuangan1. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja

2.2.1. Masalah Sumber Daya Manusia2.2.2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah2.2.3. Masalah sistem pengendalian intern |
| BAB I11 | PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH3.1. Penjelasan Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran3.1.1. Pendapatan Daerah 3.1.2. Belanja Daerah3.1.3. Belanja Operasi3.1.4. Pembiayaan3.2. Penjelasan Pos-pos Neraca3.2.1. Aset 3.2.2. Kewajiban3.2.3. Ekuitas3.3. Penjelasan Pos-pos Laporan Operasional3.3.1. Beban3.3.2. Surplus (Defisit) LO3.4. Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas3.5. Penjelasan Pos-pos Laporan Arus Kas |
| BAB IV | INFORMASI NON KEUANGAN |
| BAB V | PENUTUP |

# II. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

## 2.1. IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kecamatan Yosowilangun Tahun 2019 sebagai berikut.

### BELANJA DAERAH

Belanja merupakan pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun angaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

Anggaran belanja daerah yang dikelola oleh Kecamatan Yosowilangun meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung meliputi belanja gaji dan tunjangan pegawai. Sedangkan belanja langsung meliputi belanja yang berkaitan dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

Ikhtisar pencapaian kinerja pengeluaran belanja tahun 2019 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.1. Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan – Belanja Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Belanja** | **Anggaran** | **Realisasi** | **%** | **Sisa Anggaran** |
| 1 | Belanja Operasi | 2.548.741.003 | 2.429.767.095 | 95.33 | 118.973.908 |
| 2 | Belanja Modal | 105.150.000 | 104.442.000 | 99.33 | 708.000 |
|  | Jumlah Belanja | 2.653.891.003 | 2.534.209.095 | 95.49 | 119.681.908 |

###

Perbandingan realisasi jenis belanja selama 5 (lima) tahun terakhir sebagaimana Tabel berikut :

Tabel 2.2. Perkembangan Realisasi Belanja Operasi Tahun 2015 - 2019

| **Belanja** | **2015** | **2017** | **2017** | **2018** | **2019** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Pegawai | 1.040.642.899 | 1.128.493.408 | 353.454.540 | 948.911.622 | 1.296.208.376 |
| Belanja Barang dan Jasa | 424.094.221 | 566.121.714 | 814.890.763 | 994.165.815 | 1.133.558.719 |
| Belanja Modal | 569.590.275 | 58.472.000 | 682.863.000 | 180.675.000 | 104.442.000 |
| **Jumlah** | 2.034.327.395 | 1.753.087.122 | 1.851.208.303 | 2.123.752.437 | 2.534.209.095 |
| % Kenaikan | 63.42 | -13.82 | 5.60 | 14.72 | 19.33 |

Kenaikan dan penurunan persentase belanja operasional dipengaruhi oleh belanja pegawai (gaji ASN) dan belanja modal konstruksi serta kenaikan standar harga barang.

## REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA PROGRAM

Realisasi kinerja berdasarkan program dan kegiatan pada tahun 2019 sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| Program 1 | : ProgramPelayananAdministrasiPerkantoran |
| Kegiatan 1 | : PelayananAdministrasi danOperasionalPerkantoran |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Pegawai
 | 28.250.000 | 28.240.000 |  |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 373.071.000 | 354.222.719 |  |
| Jumlah Kegiatan 1 | 401.321.000 | 382.462.719 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Program 2 | : ProgramPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur |
| Kegiatan 1 | : Pembangunan/Pengadaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Aparatur |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 27.250.000 | 27.060.000 |  |
| * Belanja Modal Peralatan & Mesin
 | 90.150.000 | 89.592.000 |  |
| * Belanja Modal Gedung & Bangunan
 | 15.000.000 | 14.850.000 |  |
| Jumlah Kegiatan 1 | 132.400.000 | 131.502.000 |  |
|  |
| Kegiatan 2 | : PemeliharaanRutin/BerkalaSarana danPrasaranaAparatur |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 101.491.000 | 92.012.600 |  |
| Jumlah Kegiatan 2 | 101.491.000 | 92.012.600 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Program 3 | : ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan |
| Kegiatan 1 | : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD /LAKIP |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Pegawai
 | 0 | 0 | PAK |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 0 | 0 | PAK |
| Jumlah Kegiatan 1 | 0 | 0 |  |
|  |
| Kegiatan 2 | : Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Prognosis Realisasi Anggaran |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 1.360.000 | 1.360.000 |  |
| Jumlah Kegiatan 2 | 1.360.000 | 1.360.000 |  |
|  |
| Kegiatan 3 | : Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Pegawai
 | 740.000 | 740.000 |  |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 1.720.000 | 1.467.200 |  |
| Jumlah Kegiatan 3 | 2.460.000 | 2.207.200 |  |
|  |
| Kegiatan 4 | : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Pegawai
 | 3.150.000 | 3.138.000 |  |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 14.850.000 | 9.708.000 |  |
| Jumlah Kegiatan 4 | 18.000.000 | 12.846.000 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Program 4 | : Program Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan |
| Kegiatan 1 | : Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Pemerintahan |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Pegawai
 | 2.610.000 | 2.568.000 |  |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 350.370.000 | 342.759.000 |  |
| Jumlah Kegiatan 1 | 352.980.000 | 345.327.000 |  |
|  |
| Kegiatan 2 | : Fasilitasi dan Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 35.340.000 | 35.340.000 |  |
| Jumlah Kegiatan 2 | 35.340.000 | 35.340.000 |  |
|  |
| Kegiatan 3 | : Fasilitasi dan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 201.180.000 | 198.090.200 |  |
| Jumlah Kegiatan 3 | 201.180.000 | 198.090.200 |  |
|  |
| Kegiatan 4 | : Fasilitasi dan Koordinasi Bidang Perekonomian dan Pembangunan |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 4.630.000 | 4.529.000 |  |
| Jumlah Kegiatan 4 | 4.630.000 | 4.529.000 |  |
|  |
| Kegiatan 5 | : Peningkatan Pelayanan Administrasi pada Masyarakat |
| Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | Keterangan |
| * Belanja Pegawai
 | 2.746.000 | 2.745.000 |  |
| * Belanja Barang & Jasa
 | 67.060.000 | 67.010.000 |  |
| Jumlah Kegiatan 5 | 69.806.000 | 69.755.000 |  |

## POSISI KEUANGAN

Posisi keuangan sebagaimana tercermin di neraca daerah terdiri atas aset, kewajiban dan ekuitas dana. Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau manfaat sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediakan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Sedangkan ekuitas dana mencerminkan kekayaan bersih pemerintah yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

Posisi keuangan Kecamatan Yosowilangun selam 5 (lima) tahun terakhir sebagai berikut :

Tabel 2.3. Perkembangan Posisi Keuangan Per 31 Desember 2015 s.d. 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posisi Keuangan | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1. Aset
 | 1.882.379.708,94 | 1.832.307.067 | 2.382.126.263,42 | 2.407.912.989,08 | 2.393.120.627,27 |
| 1. Kewajiban
 | 1.686.191 | 1.789.262 | 6.660.282 | 31.437.141 | 38.211.247 |
| 1. Ekuitas
 | 1.880.693.517,94 | 1.830.517.805 | 2.375.465.981,42 | 252.723.411,08 | 179.299.714,73 |
| Jumlah Kewajiban & Ekuitas | 1.882.379.708,94 | 1.832.307.067 | 2.382.126.263,42 | 2.407.912.989,08 | 2.393.120.627,27 |

## 2.2. HAMBATAN DAN KENDALA DALAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN

Beberapa permasalahan yang menjadi penghambatan dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut.

### 2.2.1. Masalah Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam upaya pencapaian target kinerja keuangan. Kondisi SDM yang ada pada saat ini secara umum masih terbatas jumlahnya khususnya yang memiliki kualitas atau *skill* sesuai kebutuhan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual.

Fungsi akuntansi yang ada di PPK SKPD belum sepenuhnya dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, hal ini dikarenakan yang melaksanakan fungsi akuntansi PPK SKPD tidak memiliki kompetensi yang memadai dalam bidang akuntansi, akibatnya penyusunan laporan keuangan SKPD menjadi terlambat yang berdampak pada keterlambatan konsolidasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah dengan mengoptimalkan SDM yang ada dengan jalan meningkatkan kemampuannya dengan menugaskan untuk mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, pembinaan-pembinaan secara intensif dan lain-lain baik formal maupun non formal yang diselenggarakan sendiri oleh BKD, BPKD dan Inspektorat.

### 2.2.2. Lemahnya pemahaman aparatur terhadap regulasi tentang pengelolaan keuangan dan barang daerah

Pengelolaan keuangan daerah memerlukan pemahaman yang memadai terhadap regulasi yang mengaturnya. Selama ini pemahaman terhadap regulasi yang masih lemah seringkali menjadi permasalahan tersendiri bagi pejabat pengelola keuangan daerah. Hal ini disebabkan seringkali aturan-aturan yang melandasinya berubah sesuai dengan perkembangan terkini terhadap kondisi keuangan negara/daerah.

Upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahanan SDM terhadap regulasi yang mengatur pengelolaan keuangan dan barang daerah adalah dengan jalan mengikuti bimbingan teknis dan pembinaan-pembinaan secara rutin dan berkala serta melakukan konsultasi-konsultasi kepada instansi yang berkompeten misalnya BPKD dan Inspektorat.

### 2.2.3. Masalah sistem pengendalian intern

Salah satu permasalahan utama yang sedang dihadapi terkait dengan implementasi sistem pengendalian intern adalah lemahnya sistem manajemen aset/barang daerah. Pengelolaan barang daerah masih menghadapi berbagai permasalahan yang memerlukan penanganan yang serius. SKPD masih menganggap barang daerah bukan merupakan bagian yang penting dalam pengelolaan keuangan dan barang daerah, sehingga administrasi barang daerah masih lemah. Indikasinya adalah masih banyak aset atau barang daerah yang tidak tercatat di dalam laporan barang inventaris, barang-barang yang hilang atau rusak tidak dilakukan penghapusan sehingga masih tercatat di laporan barang inventaris. Disamping itu masih terdapat aset-aset pihak lain yang tercatat dan diakui sebagai aset Pemerintah Daerah.

Permasalahan tersebut di atasi melalui kegiatan validasi dan verifikasi atas aset SKPD melalui kegiatan yang di koordinasikan oleh BPKD Kabupaten Lumajang.

##

# III. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

##

## 3.1. PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Informasi yang disajikan di dalam LRA.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Daerah | **Anggaran TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2018****(Rp)** |
| **2.653.891.003** |  | **2.534.209.095** |  | 2.123.752.437 |

Belanja daerah meliputi belanja operasi, belanja modal. Realisasi belanja tahun 2019 sebesar Rp.2.534.209.095,- Realisasinya mencapai 95,49% dari anggaran sebesar Rp.2.653.891.003,-. Dibandingkan dengan tahun 2019, realisasi belanja Tahun 2019 naik 0,58%.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Operasi | **Anggaran TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2018****(Rp)** |
| **2.548.741.003** |  | **2.429.767.095** |  | **1.950.377.437** |

Belanja operasi pada SKPD terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang dan jasa, dengan realisasi sebagai berikut.

Tabel 3.1. Realisasi Belanja Operasi tahun 2019 dan 2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Belanja Operasi** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** | **%** | **Realisasi 2018** |
| 1 | Belanja Pegawai | 1.370.419.003 | 1.296.208.376 |  | 948.911.622 |
| 2 | Belanja Barang dan Jasa | 1.178.322.000 | 1.133.558.719 |  | 1.001.465.815 |
|  | **Jumlah** | **2.548.741.003** | **2.429.767.095** |  | **1.950.377.437** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja** **Pegawai** | **Anggaran TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2018****(Rp)** |
| **1.370.419.003** |  | **1.296.208.376** |  | **948.911.622** |

Belanja pegawai meliputi belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja pegawai ( tidak langsung merupakan pengeluaran untuk belanja gaji dan tunjangan pegawai, sedangkan belanja pegawai – belanja langsung merupakan pengeluaran belanja pegawai yang terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan SKPD. Rincian realisasi belanja pegawai sebagai berikut:

Tabel 3.2. Realisasi Belanja Pegawai tahun 2019 dan 2018

| **No.** | **Rincian Belanja Pegawai** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** | **%** | **Realisasi 2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **BELANJA TIDAK LANGSUNG** |  |  |  |  |
| 1 | Gaji pokok PNS / uang representasi | 694.811.447 | 691.512.176 | 99,53 | 511.996.819 |
| 2 | Tunjangan keluarga | 75.841.032 | 71.915.304 | 94,82 | 49.679.906 |
| 3 | Tunjangan jabatan | 80.485.000 | 74.960.000 | 93,14 | 56.160.000 |
| 4 | Tunjangan fungsional umum | 16.222.100 | 16.220.000 | 99,99 | 11.875.000 |
| 5 | Tunjangan beras | 36.550.752 | 36.137.580 | 98,87 | 27.374.760 |
| 6 | Tunjangan PPh/tunjangan khusus | 932.246 | 624.709 | 67,01 | 0 |
| 7 | Pembulatan gaji | 16.703 | 9.085 | 54,39 | 7.130 |
| 8 | Iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian | 6.486.648 | 5.656.652 | 87,20 | 4.020.135 |
| 9 | Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | 421.577.075 | 361.741.870 | 85,81 | 66.661.087 |
| 10 | Tunjangan uang makan | 0 | 0 | 0 | 56.457.785 |
|  | Jumlah belanja pegawai tidak langsung | 1.332.923.003 | 1.258.777.376 | 94,44 | 784.232.622 |
|  | **BELANJA LANGSUNG** |  |  |  |  |
| 1 | Honorarium PNS | 14.340.000 | 14.340.000 | 100 | 77.915.000 |
| 2 | Honorarium Non PNS | 0 | 0 |  | 0 |
| 3 | Uang lembur PNS | 23.156.000 | 23.091.000 | 99,72 | 85.564.000 |
|  | Jumlah Belanja Pegawai Langsung | 37.496.000 | 37.431.000 | 99,83 | 164.679.000 |
|  | Jumah Belanja Pegawai | 1.370.419.003 | 1.296.208.376 | 94,58 | 948.911.622 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Belanja** **Barang dan Jasa** | **Anggaran TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2018****(Rp)** |
| **1.178.322.000** |  | **1.133.558.719** |  | **1.001.465.815** |

 Belanja barang dan jasa adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah, meliputi belanja persediaan, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas dan belanja lainnya. Rincian realisasi belanja barang dan jasa tahun 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 3.3. Realisasi Belanja Barang & Jasa tahun 2019 dan 2018

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Belanja Barang dan Jasa** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** | **Realisasi 2018** |
| 1 | Belanja Persediaan | 317.303.000 | 307.338.865 | 320.642.625 |
| 2 | Belanja Jasa | 628.688.000 | 618.922.254 | 498.697.490 |
| 3 | Belanja Pemeliharaan | 83.491.000 | 74.012.600 | 45.445.700 |
| 4 | Belanja Perjalanan Dinas | 121.590.000 | 106.225.000 | 136.680.000 |
| 5 | Belanja Alat Rumah Tangga | 27.250.000 | 27.060.000 | 0 |
|  | **Jumlah** | **1.178.322.000** | **1.133.558.719** | **1.001.465.815** |

###### **Belanja Persediaan**

Belanja persediaan meliputi belanja yang akan menambah persediaan antara lain belanja pakai habis; bahan/material; cetak dan penggandaan; makan dan minum; belanja pakaian dinas/kerja; dan barang yang akan diserahkan/dijual kepada masyarakat/ pihak ke tiga. Belanja Persediaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 307.338.865, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.4. Realisasi Belanja Persediaan tahun 2019

| **No.** | **Belanja Persediaan** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja alat tulis kantor | 49.515.000 | 49.492.465 |
| 2 | Belanja alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) | 4.512.000 | 4.274.000 |
| 3 | Belanja perangko, materai, dan benda pos lainnya | 2.160.000 | 1.761.000 |
| 4 | Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 4.626.000 | 4 626 000 |
| 5 | Belanja umbul-umbul/bendera | 1.700.000 | 1.700.000 |
| 6 | Belanja cetak | 5.150.000 | 5.150.000 |
| 7 | Belanja penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan | 15.090.000 | 13.444.400 |
| 8 | Belanja makanan dan minuman rapat | 50.550.000 | 45.690.000 |
| 9 | Belanja makanan dan minuman tamu | 14.400.000 | 12.410.000 |
| 10 | Belanja makanan dan minuman kegiatan tertentu | 87.950.000 | 87.141.000 |
| 11 | Belanja pakaian batik tradisional | 9.450.000 | 9.450.000 |
| 12 | Belanja pakaian olah raga | 14.900.000 | 14.900.000 |
| 13 | Belanja pakaian seragam | 52.500.000 | 52.500.000 |
| 14 | Belanja hadiah uang tunai | 4.800.000 | 4.800.000 |
|  | **Jumlah** | **317.303.000** | **307.338.865** |

###### **Belanja Jasa**

Belanja jasa meliputi belanja jasa kantor; sewa; ongkos/upah kerja; belanja pelatihan/kursus; jasa konsultasi; belanja operasi pemeriksaan; dan belanja lainnya yg bersifat jasa. Belanja Jasa sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 618.922.254, dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 3.5. Realisasi Belanja Jasa Tahun 2019

| **No.** | **Belanja jasa** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja telepon | 4.200.000 | 1.425.183 |
| 2 | Belanja listrik | 20.400.000 | 17.791.614 |
| 3 | Belanja kawat/faksimili/internet | 18.166.800 | 17.352.657 |
| 4 | Belanja dekorasi | 3.400.000 | 3.369.000 |
| 5 | Belanja jasa promosi/publikasi/advertising | 3.000.000 | 2.994.000 |
| 6 | Belanja penggantian transport | 45.050.000 | 43.800.000 |
| 7 | Belanja jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli | 9.200.000 | 9.200.000 |
| 8 | Belanja jasa pendukung kegiatan | 200.000 | 200.000 |
| 9 | Belanja jasa juri/wasit | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 10 | Belanja premi asuransi ketenagakerjaan | 2.851.200 | 2.604.800 |
| 11 | Belanja sewa sarana mobilitas darat | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 12 | Belanja sewa tenda dan perlengkapannya | 0 |  |
| 13 | Belanja upah/ongkos tenaga kerja bulanan | 498.000.000 | 498.065.000 |
| 14 | Belanja tambahan upah tenaga kerja bulanan | 21.220.000 | 19.120.000 |
|  | **Jumlah** | **628.688.000** | **618.922.254** |

###### **Belanja Pemeliharaan**

Belanja pemeliharaan meliputi belanja pemeliharaan aset tetap seperti peralatan dan mesin; gedung dan bangunan; jalan irigasi dan jaringan dan aset tetap lainnya. Belanja Pemeliharaan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 74.012.600 terinci sebagai berikut.

Tabel 3.6. Realisasi Belanja Pemeliharaan tahun 2019

| **No.** | **Belanja Pemeliharaan** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja bahan bakar minyak dan pelumas | 29.720.000 | 24.691.200 |
| 2 | Belanja jasa servis dan penggantian suku cadang | 31.472.000 | 31.448.500 |
| 3 | Belanja STNK kendaraan dinas/operasional | 3.100.000 | 1.539.900 |
| 4 | Belanja pemeliharaan alat pendingin | 5.000.000 | 2.350.000 |
| 5 | Belanja pemeliharaan personal komputer | 4.900.000 | 4.820.000 |
| 6 | Belanja pemeliharaan peralatan personal komputer | 2.500.000 | 2.365.000 |
| 7 | Belanja pemeliharaan bangunan gedung kantor | 6.799.000 | 6.798.000 |
|   | **Jumlah** | **83.491.000** | **74.012.600** |

###### **Belanja Perjalanan Dinas**

Belanja perjalanan dinas meliputi belanja untuk perjalanan dinas baik dalam maupun luar daerah. Belanja Perjalanan Dinas sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 136.680.000, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.7. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Belanja Perjalanan Dinas** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| 1 | Belanja perjalanan dinas dalam daerah | 95.590.000 | 84.150.000 |
| 2 | Belanja perjalanan dinas luar daerah | 26.000.000 | 22.075.000 |
|  | **Jumlah** | **121.590.000** | **106.225.000** |

1. **Belanja Alat Rumah Tangga**

Belanja Alat Rumah Tangga sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 27.060.000, yang terinci sebagai berikut :

Tabel. 3.8. Realisasi Belanja Alat Rumah Tangga tahun 2019

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Belanja Alat Rumah Tangga** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| 1 | Belanja meubelair | 23.750.000 | 23.650.000 |
| 2 | Belanja alat pengukur waktu | 800.000 | 770.000 |
| 3 | Belanja alat pendingin | 1.800.000 | 1.760.000 |
| 4 | Belanja home use | 900.000 | 880.000 |
|  | **Jumlah** | **27.250.000** | **27.060.000** |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Belanja Modal | **Anggaran TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2019****(Rp)** |  | **Realisasi TA 2018****(Rp)** |
| **105.150.000** |  | **104.442.000** |  | **180.675.000** |

Belanja modal meliputi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, belanja modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja modal aset tetap lainnya dan belanja modal aset lainnya.

Realisasi belanja modal tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.9. Realisasi Belanja Modal Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Belanja Modal** | **Anggaran 2019** | **Realisasi 2019** | **%** | **Realisasi 2018** |
| 1 | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 90.150.000 | 89.592.000 | 99,38 | 88.525.000 |
| 2 | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 15.000.000 | 14.850.000 | 99,00 | 92.150.000 |
|  | **Jumlah** | **105.150.000** | **104.442.000** |  | **180.675.000** |

###### **Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 89.592.000, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.10. Realisasi Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019

| **No.** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja modal pompa | 650.000 | 650.000 |
| 2 | Belanja modal alat penyimpanan perlengkapan kantor | 15.000.000 | 14.982.000 |
| 3 | Belanja modal meubelair | 14.000.000 | 13.915.000 |
| 4 | Belanja modal alat pendingin | 8.000.000 | 7.920.000 |
| 5 | Belanja modal home use | 16.000.000 | 15.895.000 |
| 6 | Belanja modal alat pemadam kebakaran | 5.000.000 | 4.950.000 |
| 7 | Belanja modal personal komputer | 14.000.000 | 13.860.000 |
| 8 | Belanja modal peralatan personal komputer | 8.000.000 | 7.920.000 |
| 9 | Belanja modal meja kerja pejabat | 6.500.000 | 6.500.000 |
| 10 | Belanja modal alat komunikasi telephone | 3.000.000 | 3.000.000 |
|  | **Jumlah** | 89.250.000 | 88.525.000 |

###### **Belanja Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan meliputi belanja yang akan menambah modal yaitu Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja. Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2019 terealisasi sebesar Rp. 14.850.000, terinci sebagai berikut.

Tabel 3.11. Realisasi Modal Peralatan dan Mesin tahun 2019

| **No.** | **Belanja Modal Peralatan dan Mesin** | **Anggaran** | **Realisasi** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Belanja modal bangunan gedung kantor | 15.000.000 | 14.850.000 |
|  | **Jumlah** | 15.000.000 | 14.850.000 |

**3.2. PENJELASAN POS-POS NERACA**

### ASET

Aset lancar per 31 Desember 2019 dan 2018 terdiri dari kas dan setara kas, piutang, biaya di bayar di muka dan persediaan sebagai berikut :

Tabel 3.12. Rincian Aset Lancar per 31 Desember 2019 dan 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **31 Desember 2019** | **31 Desember 2018** |
| Kas di bendahara pengeluaran | 0 | 0 |
| Kas lainnya | 0 | 0 |
| Piutang pajak | 0 | 0 |
| Piutang retribusi | 0 | 0 |
| Penyisihan Piutang Tak Tertagih | 0 | 0 |
| Biaya Dibayar Dimuka | 0 | 0 |
| Persediaan | 2.327.160 | 1.011.000 |
| **Jumlah** | **2.327.160** | **1.011.000** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **a.**Persediaan | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **2.327.160** |  | **1.011.000** |

Saldo persediaan per 31 Desember 2019 dan 2018, merupakan hasil *stock opname* yang dicatat dengan metode periodik (fisik). Persediaan yang diperoleh melalui pembelian di ukur sebesar harga perolehan dengan metode harga pembelian terakhir.

Tabel 3.13. Laporan Persediaan Per 31 Desember 2019

| **No.** | **Uraian** | **Jumlah** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Persediaan per 31 Desember 2018 |  | 1.011.000 |
| 2 | Koreksi tahun berjalan atas persediaan awal  |  | 0 |
| 3 | Saldo persediaan setelah koreksi (1+2) |  | 1.011.000 |
| **4** | **Ditambah :** |  |  |
| 5 | Belanja Persediaan LRA 2019 | 301.750.865 |  |
| 6 | Belanja Persediaan belum dibayar (utang belanja) | 0 |  |
| 7 | Jumlah tambahan persediaan (5+6) | 301.750.865 |  |
| **8** | **Dikurangi :** |  |  |
| 9 | Pembayaran utang belanja persediaan LRA 2017 | 0 |  |
| 10 | Pengeluaran hibah persediaan | 0 |  |
| 11 | Jumlah tambahan persediaan bersih (11+12) |  | 0 |
| 12 | Jumlah persediaan yang siap digunakan |  | 301.750.865 |
| 13 | Beban Persediaan (lihat Laporan Operasional) |  | - 299.423.705 |
| 14 | Persediaan tahun 2019 (12+13) |  | 2.327.160 |

Tabel 3.14. Daftar Persediaan Tahun 2019 dan 2018

*dalam rupiah*

| **No** | **Persediaan** | **2019** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Persediaan Alat Tulis Kantor | 2.239.160 | 931.000 |
| 2 | Persediaan Barang cetakan | 0 | 0 |
| 3 | Persediaan Materai | 24.000 | 21.000 |
| 4 | Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih | 64.000 | 59.000 |
|  | **Jumlah** | **2.327.160** | **1.011.000** |

### ASET TETAP

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Aset Tetap | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **2.298.531.267,27** |  | 2.310.678.443,48 |

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap milik Pemerintah Kabupaten Lumajang meliputi tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya dan konstruksi dalam pengerjaan.

Seluruh aset tetap milik pemerintah kabupaten Lumajang disusutkan, kecuali tanah, aset tetap lainnya selain alat musik modern dan aset tetap renovasi, dan konstruksi dalam pengerjaan.Atas dasar pertimbangan kepraktisan, penerapan metode penyusutan sebagai berikut.

* Metode penyusutan garis lurus (*straight line*).
* Dalam menghitung penyusutan, nilai sisa aset tetap di akhir masa manfaatnya di abaikan.
* Aset tetap disusutkan satu tahun penuh tanpa melihat tanggal dan bulan perolehan aset tetap (pendekatan tahunan).
* Perubahan nilai aset tetap akibat penambahan / pengurangan kualitas dan/atau nilai aset tetap, maka penambahan/pengurangan tersebut dikapitalisasi ke dalam nilai yang dapat disusutkan.
* Masa manfaat aset tetap telah ditetapkan dalam kebijakan akuntansi dan tidak dapat dirubah kecuali (1) terjadi perubahan karakteristik fisik/penggunaan aset tetap; (2) terjadi perbaikan aset tetap yang menambah masa manfaat atau kapasitas manfaat; atau (3) terdapat kekeliruan dalam penetapan masa manfaat aset tetap yang baru diketahui di kemudian hari.

Saldo aset tetap per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut :

Tabel 3.15. Daftar Mutasi Aset Tetap per 31 Desember 2019 dan 2018

| **No.** | **Uraian** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2018** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2019** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Tanah | 521.666.667 |  |  |  | 521.666.667 |
| 2 | Peralatan dan Mesin | 661.676.275 |  | 89.592.000 |  | 751.268.275 |
| 3 | Gedung dan Bangunan | 1.917.174.938 |  | 14.850.000 |  | 1.932.024.938 |
| 4 | Akumulasi Penyusutan | (789.839.436,52) |  | (116.589.176,21) |  | (906.428.612,73) |
|  | **Jumlah** | 2.310.678.443,48 |  | **12.147.176,21** |  | **2.298.531.267,27** |

Dari tabel 3.15 di atas, perubahan Aset Tetap sampai 31 Desember 2019 dapat dijelaskan sebagai berikut :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|   | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| Tanah | 521.666.667 |  | 521.666.667 |

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp. 521.666.667, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.16. Daftar Mutasi Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2019.

| **No** | **Uraian** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2018** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2019** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Tanah | 521.666.667 | 0 | 0 | 0 | 521.666.667 |
|  | **Jumlah** | 521.666.667 | **0** | **0** | **0** | 521.666.667 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Peralatan dan Mesin | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **751.268.275** |  | 661.676.275 |

Saldo aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2019 dan 2018, yang terinci sebagai berikut :

Tabel 3.17. Daftar Mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin

| **No** | **Peralatan dan mesin** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2018** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2018** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| 1 | Alat-alat Besar | 10.650.000 | 0 | 650.000 | 0 | 11.300.000 |
| 2 | Alat-alat Angkutan  | 239.556.000 | 0 | 0 | 0 | 239.556.000 |
| 5 | Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga | 400.670.275 | 0 | 85.942.000 | 0 | 485.962.275 |
| 6 | Alat-alat Studio dan Komunikasi | 11.450.000 | 0 | 3.000.000 | 0 | 14.450.000 |
|  | **Jumlah** | **661.676.275** | **0** | **89.592.000** | **0** | **751.268.275** |

Untuk rincian mutasi peralatan dan mesin senilai Rp.89.592.000 adalah sebagai berikut :

* Rp. 650.000 adalah pengadaan alat pompa air;
* Rp. 85.942.000 adalah pengadaan komputer, laptop, printer, scaner, filing kabinet, podium, meja rapat, sofa, AC, kamera, permadani, karpet, alat pemadam api, meja pejabat;
* Rp. 3.000.000 adalah pengadaan faximile.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  Gedung dan Bangunan | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **1.932.024.938** |  | 1.917.174.938 |

Gedung dan bangunan meliputi bangunan gedung dan minumen. Saldo gedung dan bangunan per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 3.18. Daftar Perkembangan Jenis Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2019.

*dalam rupiah*

| **No** | **Gedung dan Bangunan** | **Saldo Awal** | **Koreksi** | **Mutasi** | **Saldo** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **31 Des 2018** | **Bertambah** | **Berkurang** | **31 Des 2019** |
| 1 | Bangunan Gedung | 1.917.174.938 | 0 | 14.850.000 | 0 | 1.932.024.938 |
|  | **Jumlah** | **1.917.174.938** | **0** | **14.850.000** | **0** | **1.932.024.938** |

Mutasi senilai Rp. 14.850.000 adalah dari belanja modal tambah daya listrik kantor.

### KEWAJIBAN

Kewajiban SKPD Kecamatan Yosowilangun per 31 Desember 2019 dan 2018 berupa utang masing-masing tercatat sebagaimana diuraikan berikut.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  1. **Utang Belanja**
 | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **38.211.247** |  | **31.437.141** |

Utang belanja adalah kewajiban lancar pemerintah daerah yang belum dibayar sampai dengan tanggal pelaporan keuangan, misalnya utang belanja pegawai, barang dan jasa serta belanja modal.

Saldo utang belanja Per 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp. 38.211.247 terdiri dari utang belanja pegawai sebesar Rp. 33.429.578, utang belanja jasa Rp. 4.781.669, sebagaimana tabel dibawah.

Tabel 3.19. Rincian Utang Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Utang** | **31 Des 2018** | **Penambahan 2019** | **Pengurangan 2019** | **31 Des 2019** |
| 1 | Utang Belanja pegawai | 28.437.461 | 33.429.578 | 28.437.461 | 33.429.578 |
| 2 | Utang Belanja Jasa | 2.999.680 | 4.781.669 | 2.999.680 | 4.781.669 |
|   | **Jumlah** | **31.437.141** | **38.211.247** | **31.437.141** | **38.211.247** |

**Utang Belanja Pegawai**

Saldo utang belanja pegawai per 31 Desember 2019 sebesar Rp. 33.429.578 merupakan kewajiban atas Utang Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja PNS (TPP) yang belum terbayar sampai dengan 31 Desember 2019.

**Utang Belanja Jasa**

Saldo utang belanja jasa per 31 Desember 2018 sebesar Rp. 4.781.669 merupakan kewajiban atas jasa yang telah dikonsumsi/diterima seperti jasa atas pemakaian telepon, listrik PLN, dan internet yang belum dibayar sampai dengan akhir periode akuntansi, terinci sebagai berikut :

Tabel 3.20 Rincian Utang Belanja Jasa Tahun 2019

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Jenis Utang** | **31 Des 2018** | **Penambahan 2019** | **Pengurangan 2019** | **31 Des 2018** |
| 1 | Jasa telepon | 163.064 | 159.147 | 163.064 | 159.147 |
| 2 | Jasa listrik | 1.452.630 | 1.639.522 | 1.452.630 | 1.639.522 |
| 3 | Jasa internet | 1.383.986 | 2.983.000 | 1.383.986 | 2.983.000 |
|  | **Jumlah** | **2.999.680** | **4.781.669** | **2.999.680** | **4.781.669** |

### EKUITAS

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekuitas | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **2.393.120.627,27** |  | 2.407.456.643,48 |

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah, merupakan selisih antara jumlah aset dan jumlah kewajiban pemerintah. Saldo ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018 sebagai berikut.

Tabel 3.21. Daftar Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Akun** | **31 Desember 2019** | **31 Desember 2018** |
| 1 | Jumlah Aset | 2.393.120.627,27 | 2.407.456.643,48 |
| 2 | Jumlah Kewajiban | 38.211.247 | 31.437.141 |
| 3 | Ekuitas (1(2) | 2.393.120.627,27 | 2.407.456.643,48 |

Ekuitas meliputi ekuitas awal ditambah surplus (defisit) LO dan ditambah/dikurangi dengan dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi/ kesalahan mendasar, sebagai berikut.

Tabel 3.22. Daftar Rincian Ekuitas per 31 Desember 2019 dan 2018

*dalam rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2019** | **2018** |
|
| 1 | Ekuitas Awal | 2.376.019.502,48 | 2.376.019.502,48 |
| 2 | Surplus (Defisit) LO | (2.555.319.217,21) | 0 |
| 3 | Dampak kumulatif perubahan kebiajakan akuntansi / kesalahan mendasar |  | 0 |
| 4 | EKUITAS AKHIR | (179.299.714,73) | 2.376.019.502,48 |

Rincian dampak kumulatif perubahan kebijakan akuntansi/kesalahan mendasar sebagaimana dijelaskana di dalam penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas.

## PENJELASAN POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

### 3.3.1. BEBAN

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beban Pegawai-LO | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **1.301.200.493** |  | 974.386.130 |

Jumlah tersebut merupakan beban pegawai yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah tahun 2019 dan 2018, sebagai berikut.

Tabel 3.23. Perhitungan Beban Pegawai Tahun 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **BEBAN PEGAWAI** | **(Rp.)** | **(Rp.)** |
| Belanja Tidak Langsung Pegawai Dari LRA | 1.258.777.376 |  |
| Belanja Langsung Pegawai Dari LRA | 37.431.000 |  |
| Utang Belanja Pegawai yang menambah beban Tahun 2019  | 33.429.578 | **(+)** |
| **Jumlah Belanja Pegawai** |  | **1.329.637.954** |
| Utang Belanja Pegawai yang menambah beban Tahun 2019 yang dibayarkan di 2019 |  28.437.461 |  |
| **Jumlah Pengurangan Beban** | **(-)** |  **28.437.461** |
| **Beban Pegawai – LO** |  | **1.301.200.493** |

Tabel 3.24. Rincian Beban Pegawai Tahun 2019 dan 2018

| **Uraian** | **2019****(Rp.)** | **2018****(Rp.)** |
| --- | --- | --- |
| **Beban Pegawai Belanja Tidak Langsung** |  |  |
| Gaji pokok PNS / uang representasi | 691.512.176 | 509.033.866 |
| Tunjangan keluarga | 71.915.304 | 49.679.906 |
| Tunjangan jabatan | 74.960.000 | 56.160.000 |
| Tunjangan fungsional umum | 16.220.000 | 11.875.000 |
| Tunjangan beras | 36.137.580 | 27.374.760 |
| Tunjangan PPh/tunjangan khusus | 624.709 | 0 |
| Pembulatan gaji | 9.085 | 7.130 |
| Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian | 5.656.652 | 4.020.135 |
| Tunjangan uang makan | 0 | 56.457.785 |
| Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja | 366.733.987 | 95.098.548 |
| **Beban Pegawai Belanja Langsung** |  |  |
| Honorarium tim teknis kegiatan | 0 | 3.900.000 |
| Honorarium pengadaan barang/jasa | 2.100.000 | 2.100.000 |
| Honorarium penanggung jawab pengelola keuangan | 0 | 38.640.000 |
| Honorarium penyimpan dan pengurus barang | 2.100.000 |  4,200,000  |
| Honorarium penerima hasil pekerjaan | 1.800.000 | 3,600,000  |
| Honorarium petugas SIAK | 8.340.000 |  6,875,000  |
| Honorarium tim verifikasi APBDesa | 0 |  18,600,000  |
| Honorarium tim teknis kegiatan | 0 |  1,200,000  |
| Uang lembur PNS | 23.091.000 | 85.564.000 |
| **Jumlah Belanja Pegawai LO** | **1.301.200.493** | 974.386.130 |

Dari rincian beban pegawai di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tahun 2019 senilai Rp. 361.741.870 ditambah utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja Rp. 33.429.578 dikurangi utang belanja tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja tahun 2018 yang sudah dibayarkan di tahun 2019 senilai Rp. 28.437.461.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Beban Barang dan Jasa-LO | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **1.134.024.548** |  | **1.000.924.728** |

Beban barang dan jasa yang menjadi beban Pemerintah Daerah meliputi beban persediaan, beban jasa, beban perjalanan dinas, beban pemeliharaan dan beban Lain-lain. Saldo per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

Tabel 3.25. Perhitungan Beban Barang dan Jasa Tahun 2019

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **URAIAN** | **(Rp.)** | **(Rp.)** |
| Persediaan awal 1 Januari 2019 | 1.011.000 |  |
| Belanja Barang dan Jasa dari LRA | 1.133.558.719 |  |
| Utang belanja yang menambah beban Jasa | 4.781.669 |  |
| Koreksi Persediaan Awal-Kurang Catat | 0 |  |
| Belanja Modal yang tidak menambah Aset Tetap | 0 | (+) |
| **Jumlah Barang/Jasa Yang Tersedia** |  | **1.139.351.388** |
| Persediaan 31 Desember 2019 |  2.327.160  |  |
| Utang belanja yang menambah beban Tahun 2018 Yang dibayarkan di 2019 | 2.999.680 |  |
| Koreksi Persediaan-Lebih Catat | 0  |  |
| **Jumlah Pengurangan Beban** | (-) | **5.326.840** |
| **Beban Barang/Jasa – LO** |  | **1.134.024.548** |

Tabel 3.26. Rincian Beban Barang dan Jasa Tahun 2019 dan 2018

*dalam rupiah*

| **No** | **Beban Barang dan Jasa** | **Tahun 2019** | **Tahun 2018** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **Beban Bahan Pakai habis** | **60.537.305** | **73,823,000**  |
|  | Beban alat tulis kantor | 48.184.305 | 57,821,500  |
|  | Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) | 4.274.000 | 4,700,000  |
|  | Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya | 1.758.000 | 1,820,500  |
|  | Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 4.621.000 | 3,731,000  |
|  | Beban umbul-umbul/bendera | 1.700.000 | 5,750,000  |
| **2** | **Beban Jasa Kantor** | **99.414.443** | **191,308,194**  |
|  | Beban telepon | 1.421.266 | 3,032,041  |
|  | Beban listrik | 17.978.506 | 17,738,439  |
|  | Beban kawat/faksimili/internet | 18.951.671 | 11,907,464  |
|  | Beban dekorasi | 3.369.000 | 2,430,000  |
|  | Beban jasa promosi/publikasi/advertising | 2.994.000 | 1,950,250  |
|  | Beban penggantian transport | 43.800.000 | 148,350,000  |
|  | Beban jasa instruktur/narasumber/tenaga ahli | 9.200.000 | 5,900,000  |
|  | Beban jasa pendukung kegiatan | 200.000 | 0 |
|  | Beban jasa juri/wasit | 1.500.000 | 0 |
| **3** | **Beban Premi Asuransi** | **2.604.800** | **2,511,647**  |
|  | Beban premi asuransi ketenagakerjaan | 2.604.800 | 2,511,647  |
| **4** | **Beban Perawatan Kendaraan Bermotor** | **57.679.600** | **30,153,700**  |
|  | Beban bahan bakar minyak dan pelumas | 24.691.200 | 15,806,800  |
|  | Beban jasa servis dan penggantian suku cadang | 31.448.500 | 12,677,000  |
|  | Beban STNK kendaraan dinas/operasional | 1.539.900 | 1,669,900  |
| **5** | **Beban Cetak dan Penggandaan** | **18.594.400** | **19,052,125**  |
|  | Beban cetak | 5.150.000 | 4,505,000  |
|  | Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan | 13.444.400 | 14,547,125  |
| **6** | **Beban Sewa Sarana Mobilitas** | **1.500.000** | **1,800,000**  |
|  | Beban sewa sarana mobilitas darat | 1.500.000 | 1,800,000  |
| **7** | **Beban Sewa Perlengkapan dan Peralatan** | **0** | **1,500,000**  |
|  | Beban sewa tenda dan perlengkapannya | 0 | 1,500,000  |
| **8** | **Beban Makanan dan Minuman** | **145.241.000** | **202,305,000**  |
|  | Beban makanan dan minuman rapat | 45.690.000 | 136,887,000  |
|  | Beban makanan dan minuman tamu | 12.410.000 | 18,423,000  |
|  | Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu | 87.141.000 | 46,995,000  |
| **9** | **Beban Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu** | **76.850.000** | **29,125,000**  |
|  | Beban pakaian batik tradisional | 9.450.000 | 0 |
|  | Beban pakaian olah raga | 14.900.000 | 21,625,000  |
|  | Beban pakaian seragam | 0 | 7,500,000  |
|  | Beban pakaian kegiatan tertentu | 52.500.000 | 0 |
| **10** | **Beban Perjalanan Dinas** | **106.290.000** | **129,380,000**  |
|  | Beban perjalanan dinas dalam daerah | 84.215.000 | 70,910,000  |
|  | Beban perjalanan dinas luar daerah | 22.075.000 | 58,470,000  |
| **11** | **Beban Upah/Ongkos Tenaga Kerja** | **517.120.000** | **300,880,000**  |
|  | Beban upah/ongkos tenaga kerja bulanan | 498.000.000 | 288,000,000  |
|  | Beban tambahan upah tenaga kerja bulanan | 19.120.000 | 12,880,000  |
| **12** | **Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat** | **4.800.000** | **0** |
|  | Beban hadiah uang tunai | 4.800.000 | 0 |
| **13** | **Beban Alat Rumah Tangga** | **27.060.000** | **0** |
|  | Beban meubelair | 23.650.000 | 0 |
|  | Beban alat pengukur waktu | 770.000 | 0 |
|  | Beban alat pendingin | 1.760.000 | 0 |
|  | Beban home use | 880.000 | 0 |
| **14** | **Beban Bangunan Gedung Tempat Kerja** | **0** | **3,794,062**  |
|  | Beban bangunan gedung instalasi | 0 | 3,794,062  |
| **15** | **Beban Bangunan Gedung Tempat Tinggal** | **0** | **6,767,000**  |
|  | Beban rumah negara golongan I | 0 | 6,767,000  |
| **16** | **Beban Pemeliharaan Alat Rumah Tangga** | **2.350.000** | **2,855,000**  |
|  | Beban pemeliharaan alat pendingin | 2.350.000 | 2,855,000  |
| **17** | **Beban Pemeliharaan Komputer** | **7.185.000** | **5,670,000**  |
|  | Beban pemeliharaan personal komputer | 4.820.000 | 3,440,000  |
|  | Beban pemeliharaan peralatan personal komputer | 2.365.000 | 1,240,000  |
|  | Beban pemeliharaan peralatan jaringan | 0 | 990,000  |
| **18** | **Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung Tempat Kerja** | **6.798.000** | **0** |
|  | Beban pemeliharaan bangunan gedung kantor | 6.798.000 | 0 |
|  | **Jumlah** | **1.134.024.548** | **1,000,924,728** |

Dari rincian beban barang dan jasa di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Beban persediaan ATK senilai Rp. 48.184.305,- merupakan pemakaian saldo akhir tahun 2018 senilai Rp. 931.000 ditambah dengan belanja pada LRA tahun 2019 senilai Rp. 49.492.465 dikurangi dengan saldo akhir tahun 2019 senilai Rp. 2.239.160.
2. Beban persediaan materai senilai Rp. 1.758.000 berasal dari belanja perangko tahun 2019 Rp. 1.461.000 ditambah nilai persediaan perangko tahun 2018 Rp. 21.000 dikurangi sisa akhir tahun 2019 Rp. 24.000.
3. Beban Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih berasal dari belanja Persediaan Alat kebersihan dan Bahan Pembersih tahun 2019 Rp. 4.626.000 ditambah saldo tahun 2018 Rp. 59.000 dikurangi sisa akhir tahun 2019 Rp. 64.000.
4. Beban telepon Rp. 1.421.266 berasal dari belanja telepon tahun 2019 Rp. 1.425.183 dikurangi beban telepon tahun 2018 Rp. 163.064 ditambah beban telepon akhir tahun 2019 Rp. 159.147.
5. Beban listrik Rp. 17.978.506 berasal dari belanja listrik tahun 2019 Rp. 17.791.614 dikurangi beban listrik tahun 2018 Rp. 1.452.630 ditambah beban listrik akhir tahun 2019 Rp. 1.639.522.
6. Beban internet Rp. 18.951.671 berasal dari belanja internet tahun 2019 Rp. 17.352.657 dikurangi beban internet tahun 2018 Rp. 1.383.986 ditambah beban internet akhir tahun 2019 Rp. 2.983.000.

Sedangkan untuk Beban Persediaan tahun 2019 senilai Rp. 306,022,705dapat diuraian secara rinci sebagai berikut :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **No** | **Beban Persediaan** | **Tahun 2019** |
| **1** | **Beban Bahan Pakai habis** |  **60,537,305**  |
|  | Beban alat tulis kantor | 48,184,305  |
|  | Beban alat listrik dan elektronik (lampu pijar, bateray kering) | 4,274,000  |
|  | Beban perangko, materai, dan benda pos lainnya | 1,758,000  |
|  | Beban peralatan kebersihan dan bahan pembersih | 4,621,000  |
|  | Beban umbul-umbul/bendera | 1,700,000  |
| **2** | **Beban Cetak dan Penggandaan** | **18,594,400**  |
|  | Beban cetak | 5,150,000  |
|  | Beban penggandaan/foto copy/penjilidan/penyampulan | 13,444,400  |
| **3** | **Beban Makanan dan Minuman** | **145,241,000**  |
|  | Beban makanan dan minuman rapat | 45,690,000  |
|  | Beban makanan dan minuman tamu | 12,410,000  |
|  | Beban makanan dan minuman kegiatan tertentu | 87,141,000  |
| **4** | **Beban Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu** | **76,850,000**  |
|  | Beban pakaian batik tradisional | 9,450,000  |
|  | Beban pakaian olah raga | 14,900,000  |
|  | Beban pakaian seragam | -  |
|  | Beban pakaian kegiatan tertentu | 52,500,000  |
| **5** | **Beban Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat** | **4,800,000**  |
|  | Beban hadiah uang tunai | 4,800,000  |
|   | **Jumlah** | **306,022,705**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Beban Penyusutan** | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **116.589.176,21** |  | **108,866,851.71** |

Beban penyusutan aset tetap pada tahun 2019 dan 2018, terinci sebagai berikut.

Tabel 2.27. Daftar Rincian Beban Penyusutan Tahun 2019 dan 2018

*dalam rupiah*

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keterangan** | **2019** | **2018** |
| Beban Penyusutan Aset Tetap |  |  |
| 1. Beban Penyusutan Peralatan Dan Mesin
 | 78.316.635,00 | 70.009.385,00 |
| 1. Beban Penyusutan Gedung Dan Bangunan
 | 38.272.541,21 | 38.866.466,71 |
| **Jumlah** | **116.589.176,21** | **108,866,851.71** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Surplus (Defisit) LO | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **(2.555.319.217,21)** |  | **(2,084,196,216.91)** |

Surplus (defisit) LO merupakan surplus (defisit) dari kegiatan operasional, kegiatan non operasional dan pos luar biasa, sebagai berikut.

Tabel 3.28. Rincian Surplus (Defisit) LO Tahun 2018 dan 2017

*dalam Rupiah*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Surplus (defisit)** | **2019** | **2018** |
| 1 | Surplus (Defisit) Kegiatan Operasi | (2.551.814.217,21) | (2,084,196,216.91) |
| 2 | Surplus (Defisit) Non Operasi | (3.505.000,00) | 0 |
| 3 | Pos Luar Biasa | 0 | 0 |
|  | **Jumlah** | **(2.555.319.217,21)** | **(2,084,196,216.91)** |

* 1. **PENJELASAN POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ekuitas Akhir | **31 Desember 2019** |  | **31 Desember 2018** |
| **Rp. (179.299.714,73)** |  | **Rp. 2.376.019.502,48** |

Saldo ekuitas awal tahun 2019 sebesar Rp. 2.376.019.502,48 merupakan akuitas yang sebelumnya telah disajikan di Neraca tahun 2018 *audited*.

Tabel 3.29. Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2019 dan 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Uraian** | **2019** | **2018** |
| 1 | Ekuitas Awal | 2.376.019.502,48 | 2.376.019.502,48 |
| 2 | Surplus / Defisit – LO | (2.555.319.217,21) | 0 |
| 3 | Dampak Kumulatif Koreksi Nilai Persediaan | 0 | 0 |
| 4 | Dampak Kumulatif Revaluasi Aset Tetap | 0 | 0 |
| 5 | Ekuitas SAL | 0 | 0 |
| 6 | Penyesuaian Ekuitas | 0 | 0 |
| 7 | RK – PPKD | 0 | 0 |
| 8 | Ekuitas Akhir | (179.299.714,73) | 2.376.019.502,48 |

* 1. **PENJELASAN POS-POS LAPORAN ARUS KAS**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **(2.429.767.095)** |  | **(1.943.077.437)** |

Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 2.429.767.095, yang terinci sebagai berikut.

Tabel 3.30. Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Operasi Tahun 2019 dan Tahun 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2019** | **2018** |
| 1 | Pembayaran Pegawai | 1.296.208.376 | 948.911.622 |
| 2 | Pembayaran Barang | 1.133.558.719 | 994.165.815 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | 2.429.767.095 | 1.168.345.303 |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** | **(2.429.767.095)** | **(1.168.345.303)** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi | **31 Desember 2019****(Rp)** |  | **31 Desember 2018****(Rp)** |
| **(104.442.000)** |  | **(180.675.000)** |

Jumlah Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi sampai dengan akhir tahun 2019 sebesar Rp. 104.442.000, yang terinci sebagai berikut.

Tabel 3.31. Rincian Arus Keluar Kas Aktivitas Investasi Tahun 2019 dan Tahun 2018

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No** | **Uraian** | **2019** | **2018** |
| 1 | Perolehan Peralatan dan Mesin | 89.592.000 | 88.525.000 |
| 2 | Perolehan Gedung dan Bangunan | 14.850.000 | 92.150.000 |
| Jumlah Arus Keluar Kas | 104.442.000 | 682.863.000 |
| **Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi** | **(104.442.000)** | **(682.863.000)** |

# IV. INFORMASI NON KEUANGAN

**GAMBARAN UMUM**

* 1. **SEJARAH KABUPATEN LUMAJANG**

Nama Lumajang berasal dari "LAMAJANG" yang diketahui dari penelusuran sejarah, data prasasti, naskah(naskah kuno, bukti(bukti petilasan dan hasil kajian pada beberapa seminar dalam rangka menetapkan hari jadinya.Beberapa bukti peninggalan yang ada antara lain :

1. Prasasti Mula Malurung
2. Naskah Negara Kertagama
3. Kitab Pararaton
4. Kidung Harsa Wijaya
5. Kitab Pujangga Manik
6. Serat Babat Tanah Jawi
7. Serat Kanda

Karena Prasasti Mula Manurung di nyatakan sebagai prasasti tertua dan pernah menyebut-nyebut "Negara Lamajang" maka dianggap sebagai titik tolak pertimbangan hari jadi Lumajang. Prasasti Mula Manurung mempunyai 12 lempengan tembaga . Pada lempengan VII halaman a baris 1 - 3 prasasti Mula Manurung menyebutkan "Sira Nararyya Sminingrat, pinralista juru Lamajang pinasangaken jagat palaku, ngkaneng nagara Lamajang" yang artinya: Beliau Nararyya Sminingrat (Wisnuwardhana) ditetapkan menjadi juru di Lamajang diangkat menjadi pelindung dunia di Negara Lamajang tahun 1177 Saka pada Prasasti tersebut setelah diadakan penelitian/ penghitungan kalender kuno maka ditemukan dalam tahun Jawa pada tanggal 14 Dulkaidah 1165 atau tanggal 15 Desember 1255 M.

Mengingat keberadaan Negara Lamajang sudah cukup meyakinkan bahwa 1255 M itu Lamajang sudah merupakan sebuah negara berpenduduk, mempunyai wilayah, mempunyai raja (pemimpin) dan pemerintahan yang teratur, maka ditetapkanlah tanggal 15 Desember 1255 M sebagai hari jadi Lumajang yang dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Derah Tingkat II Lumajang Nomor 414 Tahun 1990 tanggal 20 Oktober 1990

Nararyya Kirana penguasa Lamajang sejak tahun 1255 M berurutan digantikan oleh penguasa(penguasa selanjutnya sesuai dengan jaman yang merangkumnya. Selanjutnya, pada perjalanan pemerintahan Kabupaten Lumajang berturut(turut dipimpin oleh:

1. KRY Kertodirejo ( 1928 ( 1941 );
2. R. Abu Bakar  ( 1941 ( 1948 );
3. R. Sastrodikoro ( 1948 ( 1959 );
4. R. Sukardjono ( 1959 ( 1966 );
5. N.G. Subowo ( 1966 ( 1973 );
6. Suwandi ( 1973 ( 1983 );
7. Karsid ( 1983 ( 1988 );
8. H.M. Samsi Ridwan ( 1988 ( 1993 );
9. Tarmin ariyadi ( 1993 ( 1998 );
10. Drs.H. Achmad Fauzi ( 1998 ( 2003 );
11. Drs.H. Achmad Fauzi ( H. Hartono, SH, S.Sos ( 2003 – 2008);
12. DR.H. Sjahrazad Masdar,MA ( Drs. As'at ) (2008 – 2013);
13. DR.H. Sjahrazad Masdar,MA ( Drs. As'at ) (2013 ( 2018);
14. Drs. As’at, M.Ag – dr. Buntaran Suprianto, MKes (2014 – 2018);
15. H. Thoriqul Haq, M.ML - Ir.Hj. Indah Amperawati, M.Si (2018 – 2023).

Untuk mengetahui gambaran umum Kecamatan Yosowilangun dipandang perlu memahami apa itu kecamatan. Berikut dijelaskan secara umum seluk beluk kecamatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Kecamatan yang merupakan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

* 1. **VISI DAN MISI KABUPATEN LUMAJANG**

Visi Kabupaten Lumajang :

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT LUMAJANG YANG SEJAHTERA, DAN BERMARTABAT”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut, Kabupaten Lumajang memiliki misi sebagai berikut.

1. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan perekonomian daerah dengan pemanfaatan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan, menciptakan iklim usaha yang kondusif, serta meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pelaku ekonomi.
2. Meningkatkan masyarakat yang bermartabat melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik dengan peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme aparatur.
3. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui peningkatan kehidupan beragama, kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, penanganan sosial dan pengentasan kemiskinan.
	1. **LETAK GEOGRAFIS DAN BATAS WILAYAH**

Kabupaten Lumajang merupakan salah satu kabupaten di Propinsi Jawa Timur yang terletak pada koordinat 112° 5’ – 113° 22’ Bujur Timur dan 7° 52’ – 8° 23’ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Lumajang 1.790,90 KM2 atau 3,74% dari luas Provinsi Jawa Timur. Ketinggian daerah bervariasi dari 0 – 3.676 m dengan daerah yang terluas adalah pada ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) seluas 63.405,50 Ha (35,88 %) dan yang tersempit adalah pada ketinggian 0 – 25 m dari permukaan laut yaitu 19.775,45 ha atau 11,04% dari luas wilayah Lumajang.

Batas(batas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang, sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Probolinggo, sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Jember, dan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Malang. Secara administrasi wilayah Kabupaten Lumajang meliputi 21 (dua puluh satu) wilayah kecamatan.

Kecamatan Yosowilangun memiliki luas wilayah 81,30 Km² atau sekitar 4,54% dari luas Kabupaten Lumajang.Secara geografis Kecamatan Yosowilangun terletak pada 112,51 – 133,22 BT dan 70,52 – 80 LS; berada pada ketinggian 25 mdpl.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Yosowilangun adalah sebagai berikut:

* Sebelah Utara : Kecamatan Rowokangkung
* Sebelah Timur : Kabupaten Jember
* Sebelah Selatan : Kecamatan Samudra Indonesia
* Sebelah Barat : Kecamatan Kunir

Secara administrasi kewilayahan, Kecamatan Yosoilangunterdiri dari 12 (dua belas) desa yaitu :

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Desa Darungan;
2. Desa Kraton;
3. Desa Wotgalih;
4. Desa Tunjungrejo;
5. Desa Yosowilangun Kidul;
6. Desa Yosowilangun Lor;
 | 1. Desa Krai;
2. Desa Karanganyar;
3. Desa Karangrejo;
4. Desa Munder;
5. Desa Kebonsari; dan
6. Desa Kalipepe
 |

* 1. **KLIMATOLOGI DAN HIDROLOGI**

Lokasi Kabupaten Lumajang yang berada di sekitar garis katulistiwa menyebabkan mempunyai perubahan iklim dua jenis setiap tahun, yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Untuk musim kemarau berkisar pada bulan April hingga Oktober, sedangkan musim penghujan dari bulan Oktober hingga April.

Daerah Lumajang mempunyai 3 tipe iklim yaitu agak basah, sedang dan agak kering. Untuk tipe basah jumlah bulan kering rata-rata 3 bulan setahun yang mencakup daerah Gucialit, Senduro, sebagian Pasirian, Candipuro, Pronojiwo, dan Gunung Semeru. Untuk daerah dengan kategori sedang mencakup daerah Ranuyoso, Klakah, Kedungjajang, Sukodono, Lumajang, Jatiroto dan Rowokangkung dengan rata-rata bulan kering 3(4 bulan pertahunnya. Sedang daerah dengan iklim agak kering meliputi Tekung, Kunir dan Yosowilangun.

Pemantauan yang dilakukan oleh Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah sungai Bondoyudo-Mayang di Lumajang dalam kurun waktu setahun ini rata-rata hari hujan berkisar 1 sampai dengan 24 hari tiap bulannya. Pada tahun 2006 curah hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Randuagung dengan hari hujan 103 hari, sedangkan curah hujan terendah terdapat di Kecamatan Gucialit dengan hari hujan 34 hari.

* 1. **TOPOGRAFI**

Topografi Kabupaten Lumajang terbagi dalam 4 daerah yaitu; daerah gunung, pegunungan, dataran fluvial dan dataran alluvial. Pertama daerah Gunung Semeru dan Gunung Lamongan, untuk kategori yang kedua Ranuyoso, Tempursari, sekitar Gunung Semeru, sekitar Gunung Tengger dan Lamongan. Kecamatan yang termasuk dalam kategori ketiga adalah Lumajang, Sumbersuko dan Sukodono. Kategori terakhir Kecamatan Rowokangkung, Jatiroto, Yosowilangun dan sepanjang pantai mulai dari Yosowilangun sampai dengan Tempursari.

Kabupaten Lumajang terdiri dari dataran yang subur karena diapit oleh tiga gunung berapi yaitu Gunung Semeru (3.676m), Gunung Bromo (3.292m) dan Gunung Lamongan. Untuk kawasan selatan daerahnya sangat subur karena mendapat endapan sedimen dari sungai(sungai yang mengalirinya. Ada beberapa sungai yang mengalir di kawasan tersebut yaitu Kali Glidik, Kali Rawan, Kali Gede, Kali Regoyo, Rejali, Besuk Sat, Kali mujur dan Bondoyudo.

Ketinggian daerah Kabupaten Lumajang bervariasi dari 0 sampai dengan diatas 2000 m diatas permukaan laut, dengan daerah yang terluas adalah ketinggian 100 – 500 m dari permukaan laut (dpl) 63.109,15 ha (5,24%) dan yang tersempit adalah pada ketinggian > 2000 m dari permukaan laut yaitu 6.889,4 ha atau 3,85% dari luas wilayah Kabupaten Lumajang.

* 1. **TATA GUNA TANAH**

Luas wilayah administrasi Kabupaten Lumajang adalah 179.090 ha yang terbagi menjadi 21 kecamatan dan 204 desa dan kelurahan. Tata guna tanah wilayah Kabupaten Lumajang meliputi:

1. daerah pemukiman seluas 20.721 ha (11,57%);
2. lahan sawah seluas 34.672 ha (19,36%);
3. tegal seluas 59.795 ha (33,39%);
4. perkebunan seluas 12.109 ha (6,76%);
5. hutan seluas 52.303 ha (29,20%);
6. dan lainnya seluas 1.590 ha (0,89%).

Hutan merupakan daerah yang berfungsi sebagai daerah penyimpan air dan daerah penyangga yang berfungsi untuk keseimbangan alam. Namun hutan juga dapat dieksploitasi sehingga memberi manfaat ekonomi. Hutan di Kabupaten Lumajang dibagi ke dalam empat fungsi, yaitu hutan lindung seluas 11.527,60Ha, hutan produksi seluas 22.964,20Ha, hutan rakyat dan hutan konservasi lainnya seluas 30.033,20Ha.

* 1. **STRUKTUR KELEMBAGAAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA**

Sejalan dengan berlakunya Otonomi Daerah, Pemerintah Kabupaten Lumajang telah menindaklanjuti dengan penataan struktur kelembagaan organisasi pemerintah yaitu dengan menerapkan PP Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dengan cara mereformasi atau merestrukturisasi kelembagaan. Reformasi birokrasi dimaksudkan untuk memenuhi perkembangan kebutuhan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan untuk mempermudah aparat pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Reformasi birokrasi juga bertujuan untuk menciptakan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat.

Dalam periode tahun 2003 – 2007 penataan kembali fungsi (fungsi kelembagaan telah dilakukan sebanyak 2 kali. Pada tahun 2003 dilakukan penataan berdasarkan PP Nomor 8/2003 dan tahun 2008 berdasarkan PP Nomor 41/2007.

Penataan dimaksudkan agar pemerintahan dapat berfungsi secara lebih memadai, efektif, dengan struktur yang lebih proporsional, ramping, luwes dan responsif. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur agar lebih profesional sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

Penataan kelembagaan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan PP Nomor 41 tahun 2007, terdiri dari dua Sekretariat yakni Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD. Sekretariat Daerah terdiri atas 3 Asisten dan 10 Bagian. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 15 tahun 2007 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja. Yang pada tahun 2017 telah berganti dengan Struktur Organisasi yang baru.

Kabupaten Lumajang terdiri dari 21 kecamatan dan pada tingkatan berikutnya, Kabupaten Lumajang terdiri dari 205 Desa/Kelurahan, 1.718 RW dan 6.868 RT.

Sampai dengan disusunnya tulisan ini, kondisi riil SKPD Kecamatan Yosowilangun keberadaannya mendasarkan pada Peraturan Bupati Lumajang Nomor 86 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, maka Kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu dengan tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang didelegasikan oleh Bupati sesuai dengan karakteristik wilayah, kebutuhan dan tugas pemerintahan lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.



Bagan Struktur Organisasi Kecamatan

Adapun untuk data personil / pegawai pada Kecamatan Yosowilangun sampai dengan 31 Desember 2019 adalah sebagai berikut:

| **No** | **Nama** | **NIP/****Status Kepegawaian** | **Pangkat/****Golongan Ruang** | **Jabatan** | **Pendidikan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | INDRIONO KRISHNA MURTI, AP. | 19730702 199311 1 001(PNS) | Pembina Tk. I(IV/b) | Camat | S-1 |
| 2 | SOLIKIN, SP. | 19631117 198802 1 002(PNS) | Pembina(IV/b) | Sekretaris Kecamatan | S-1 |
| 3 | SUMAR’IT, SPd. | 19660114 198603 1 006(PNS) | Penata(III/c) | Kasi Pemerintahan | S-1 |
| 4 | ENDRIK SUNARIYADI, SH. | 19640201 198503 1 016(PNS) | Penata Tk. I (III/d) | Kasi Pemberdayaan Mayarakat | S-1 |
| 5 | SRI WAHYUNINGSIH | 19670609 199006 2 001(PNS) | Penata(III/c) | Kasi Pelayanan Umum | SLTA |
| 6 | SUSONGKO | 19640304 199103 1 013(PNS) | Penata Tk. I(III/d) | Kasi Perekonomian dan Pembangunan | SLTA |
| 7 |  |  |  | Kasi Ketentraman dan Ketertiban |  |
| 8 | RACHMAD SETYAWAN, S.AP. | 19740102 199602 1 001(PNS) | Penata Muda Tk.I(III/b) | Kasubag. Umum dan Kepegawaian | S-1 |
| 9 | SLAMET BUDIHARSO, SH. | 19752411 199803 1 004(PNS) | Penata Muda Tk.I(III/b) | Kasubag. Keuangan | S-1 |
| 10 | REDI NURCAHYONO | 19780426 200801 1 012(PNS) | Pengatur(II/c) | Staf Subag. Keuangan | SLTA |
| 11 | JOHAN ADI SANJAYA | 19751102 200701 019(PNS) | Pengatur(II/c) | Staf Kasi Pemberdayaan Masyarakat | SLTA |
| 12 | TJATUR AL RAHMAN | 19710621 201001 1 005(PNS) | Pengatur (II/c) | Staf Kasi Pemerintahan | SLTA |
| 13 | MU’AROMAH | 19760201 200701 2 013(PNS) | Pengatur Tk.I(II/d) | Staf Subag. Umum dan Kepegawaian | SLTA |
| 14 | DHIAN SULISTYO RINI | 19781209 200801 2 014(PNS) | Pengatur (II/c) | Staf Subag. Umum dan Kepegawaian | SLTA |
| 15 | EVA AGUSTINA DWI HARDIANI |  Non PNS | - | TenagaAdministrasi Pelayanan | S-1 |
| 16 | ANISA RIZKY |  Non PNS | - | Tenaga AdministrasiAkuntansi | S-1 |
| 17 | RULLY FARADILLA AGUSTIN |  Non PNS | - | Tenaga Pembantu Kesekretariatan | S-1 |
| 18 | MASTONO |  Non PNS | - | Tenaga Adminduk dan Pertanahan | SLTA |
| 19 | SULASTRI |  Non PNS | - | Tenaga Pembantu Kesekretariatan | SLTA |
| 20 | RIZKI MEILINA |  Non PNS | - | Tenaga Administrasi Keuangan | SLTA |
| 21 | MAKMUR MAHENDRA |  Non PNS | - | Tenaga / operator SIAK | SLTA |
| 22 | APRILIANA WULAN PUSPITASARI |  Non PNS | - | Tenaga Administrasi kependudukan | SLTA |
| 23 | AROFIQ AMRULLAH |  Non PNS | - | Pengemudi / Supir | SLTA |
| 25 | SUGIANTO WAHYU |  Non PNS | - | Penjaga malam kantor | SLTA |
| 26 | FATKHUR ROKHIM |  Non PNS | - | Tenaga Kebersihan | SD |

# V. P E N U T U P

Beberapa kesimpulan penting yang dapat diuraikan terkait dengan laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun angaran 2019 sebagai berikut.

1. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 disusun untuk memenuhi beberapa peranan antara lain akuntabilitas, manajerial, transparasi dan keseimbangan antar generasi *(Intergenerational Equity).*
2. Disamping sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBD, secara umum tujuan dari penyusunan laporan keuangan tahun 2019 adalah untuk menyediakan informasi tentang:
	1. Kemampuan Pemerintah Kabupaten Lumajang dalam merealisir pendapatan dari yang dianggarkan.
	2. Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten Lumajang berdasarkan anggaran belanja yang telah ditetapkan.
	3. Sumber-sumber pembiayaan dalam rangka menutup defisit/pemanfatan surplus anggaran.
	4. Semua aset/sumber daya ekonomis yang dikuasai dan atau dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang
	5. Kewajiban(kewajiban Pemerintah Kabupaten Lumajang kepada pihak ketiga yang belum dibayar/diselesaikan sampai dengan tanggal neraca.
	6. Kekayaan bersih (Ekuitas Dana) yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang pada tanggal neraca.
	7. Sumber-sumber penerimaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
	8. Penggunaan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi
	9. Saldo kas dan setara kas pada awal dan akhir periode akuntansi.
	10. Laporan keuangan pokok Pemerintah Kabupaten Lumajang tahun 2019 terdiri:
		1. Laporan Realisasi Anggaran yang menginformasikan tentang perbandingan antara anggaran dan realisasi APBD.
		2. Laporan Operasional yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
		3. Laporan Perubahan Ekuitas yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
		4. Laporan Arus Kas yang menginformasikan tentang perubahan saldo kas pemerintah daerah pada awal dan akhir periode akuntansi yang tersusun ke dalam aktivitas operasi, aktivitas investasi aset non keuangan , aktivitas pembiayaan dan aktivitas non anggaran.
		5. Laporan Perubahan SAL yang menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya Pos-pos Saldo Anggaran Lebih awal, Penggunaan Saldo Anggaran Lebih, Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran tahun berjalan, Koreksi Kesalahan Pembukuan tahun Sebelumnya, Lain-lain, Saldo Anggaran Lebih Akhir.
		6. Neraca daerah yang menginformasikan tentang posisi aset, kewajiban dan ekuitas dana pemerintah daerah pada tanggal 31 Desember 2019.
		7. serta Catatan atas Laporan Keuangan yang berisi tentang informasi atau penjelasan secara kualitatif atas enam laporan keuangan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Lumajang, 31 Desember 2019ttd indri.pngCAMAT YOSOWILANGUNINDRIONO KRISHNA MURTI, AP.Pembina Tingkat INIP. 19730702 199311 1 001 |